BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan SMPN di Kota Medan dalam melaksanakan pembelajaran inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini mencakup kesiapan kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta manajemen sekolah. Selain itu, juga ingin dilihat bagaimana alokasi dana, penerimaan peserta didik terhadap keberagaman, serta upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kebutuhan ABK. Pada akhirnya, fokus utama adalah memastikan adaptasi kurikulum dan berbagai elemen sekolah mampu mendukung pembelajaran inklusif secara efektif.

Hasil dari penelitian ini yang memakai 8 aspek memiliki perbedaan persentase siap, cukup siap, dan tidak siap terdapat disetiap aspeknya seperti: pada Aspek Kurikulum terdapat persentase 16% atau 7 sekolah, Aspek Guru 13,6% atau 6 sekolah, Aspek Sarana-Prasarana 13,6% atau 6 sekolah, Aspek Manajemen Sekolah 27,3% atau 12 sekolah, Aspek Dana 13,6% atau 6 sekolah, Aspek Peserta Didik 15,9% atau 7 sekolah Aspek Lingkungan 13,6% atau 6 sekolah, Aspek Proses Belajar-Mengajar 22,7% atau 10 sekolah, pada pernyataan diatas kesiapan sekolah yang tergolong siap.

Aspek Kurikulum terdapat persentase 70,5% atau 31 sekolah, Aspek Guru 72,7% atau 32 sekolah, Aspek Sarana-Prasarana 63,6% atau , Aspek Manajemen Sekolah 61,4% atau 27 sekolah, Aspek Dana 65,9% atau 29 sekolah, Aspek Peserta Didik 70,5% atau 31 sekolah, Aspek Lingkungan 68,2% atau 30 sekolah, Aspek Proses Belajar-Mengajar 56,8% sekolah pada pernyataan diatas kesiapan sekolah tergolong cukup siap.

Aspek Kurikulum terdapat persentase 13% atau 6 sekolah, Aspek Guru 13,6% atau 6 sekolah, Aspek Sarana-Prasarana 22,7% atau 10 sekolah, Aspek Manajemen Sekolah 11,4% atau 5 sekolah, Aspek Dana 20,5% atau 9 sekolah, Aspek Peserta Didik 13,6% atau 6 sekolah, Aspek Lingkungan 18,2% atau 8 sekolah, Aspek Proses Belajar-Mengajar 20,5% atau 9 sekolah, pada pernyataan diatas kesiapan sekolah yang tergolong tidak siap.

Kesimpulan secara umum apabila sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tidak tersedia guru yang kompeten, serta tidak ada ABK, maka penerapan pembelajaran inklusif belum dikatakan siap atau efektif. Ketidakhadiran faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa sekolah cukup siap dalam memenuhi syarat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif dan mampu mendukung keberagaman kebutuhan siswa.

5.2 Saran

1) Bagi Pemerintah atau Dinas Pendidikan Kota Medan

Pemerintah perlu meningkatkan dukungan finansial, infrastruktur, dan kebijakan khusus untuk sekolah inklusif. Alokasi anggaran tambahan dapat membantu sekolah dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan, seperti alat bantu belajar, teknologi pendukung, dan pelatihan intensif bagi tenaga pendidik. Selain itu, peraturan atau pedoman yang lebih jelas tentang standar inklusi akan membantu seluruh SMP Negeri Kota Madya Medan memenuhi kebutuhan ABK.

2) Bagi Sekolah

Sekolah disarankan untuk menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru dan staf dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, termasuk pelatihan dalam metode pengajaran diferensiasi, penanganan psikologis, dan pendekatan inklusif. Sekolah juga

perlu membangun budaya kerja sama antara guru, orang tua, dan tenaga ahli (psikolog, terapis) untuk mendukung proses belajar siswa ABK.

3) Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah perlu berperan aktif dalam mengembangkan program inklusif di sekolah, termasuk mendorong kolaborasi antara guru dan orang tua, serta memastikan bahwa kebutuhan khusus setiap siswa diakomodasi dengan baik. Kepala sekolah juga disarankan untuk mengadakan pertemuan rutin dengan staf pengajar untuk memonitor perkembangan program inklusif dan mencari solusi atas hambatan yang mungkin terjadi.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam terkait efektivitas metode pembelajaran khusus dalam mendukung pembelajaran inklusif atau untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Penelitian selanjutnya mempertimbangkan peran kebijakan pemerintah dan program pelatihan bagi guru dalam menjalankan sekolah bagi ABK serta mendukung penerapan pendidikan inklusif. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang ada sudah berjalan efektif atau masih membutuhkan perbaikan.